



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SETIAWAN NURDAYASAKTI
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI, DAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA
3. NHK : 755384

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.150.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/95 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	102.000.000
1. MOTOR, HONDA NF100L Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 70.500.000		
3. MOTOR, HONDA TIPE PCX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	48.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	25.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.325.250.000
III. HUTANG	Rp.	18.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.307.250.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.